

LOA RISET



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN

Surat perjanjian kerjasama penelitian ini (selanjutnya disebut sebagai “LoA”) dibuat pada Kamis, 28 Januari 2021 ini.

Bersama ini saya tanda tangani sebagai Ketua Tim dari Tim Riset Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar , Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perguruan Tinggi Swasta yang beralamat pusat di Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162, Indonesia.

Dan untuk tujuan LoA ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahdan Najib Habiby, M.Pd
Departemen : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas : FKIP
Posisi : Dosen
2. Nama :
Departemen :
Fakultas :
Posisi :

Saya setuju untuk melakukan kerjasama penelitian dengan Dr. Akif Khilmiyah Tim Peneliti Fakultas Agama Islam nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY):

1. Dr. Akif Khilmiyah
2. Sadam Fajar Shodiq, M. Pd

Sebagai Tim Peneliti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Indonesia, yang beralamat di Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan Bantul, Yogyakarta, DIY 55183, Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UMY”).

Kedua tim disini akan mengerjakan penelitian kolaboratif yang berjudul:

Evaluasi Model Manajemen Sekolah Dasar Inklusi Berkadiln Bagi Penyandang Disabilitas di Surakarta, Semarang dan Yogyakarta

LoA ini menetapkan di bawah kerangka kerja pasti dan maksud dari kedua Tim untuk berkolaborasi.

Dalam mencapai tujuan LoA ini, kedua tim akan memperoleh manfaat yang akan diperoleh untuk kerjasama penelitian dengan cara sharing dan selanjutnya menyelesaikan penelitian.

LoA ini valid dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal LoA ini.

TERTANDA:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wahdan Najib Habiby', written in a cursive style.

Wahdan Najib Habiby, M.Pd

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN SKEMA PENELITIAN TERAPAN**



**EVALUASI MODEL MANAJEMEN SEKOLAH DASAR INKLUSI
BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Akif Khilmiyah, Dr., M.Ag. (0512026801)
Ratna Sari, S.Pd.I., M.Psi. (0501088601)
Lailatul Rosyidah (20180720019)
Wahdan Najib Habiby, M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Dibiayai Oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun Anggaran 2020/2021



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Kampus terpadu: Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55183

Telp. (0274) 387656 (hunting) Fax. (0274) 387646

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Informasi Data Usulan Penelitian

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

EVALUASI MODEL MANAJEMEN SEKOLAH DASAR INKLUSI BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
--

B. SKEMA, BIDANG, TEMA, DAN TOPIK PENELITIAN

Skema Penelitian	Bidang Fokus Penelitian	Tema Penelitian	Topik Penelitian
Penelitian Terapan	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Pendidikan	Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan

C. KOLABORASI DAN RUMPUN ILMU PENELITIAN

Jenis Kolaborasi Penelitian	Rumpun Ilmu 1	Rumpun Ilmu 2	Rumpun Ilmu 3
Kolaboratif Dalam Negri	ILMU PENDIDIKAN	ILMU PENDIDIKAN	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)

2. IDENTITAS PENELITIAN

Nama	Peran	Tugas
Akif Khilmiyah, Dr., M.Ag.	Ketua Pengusul	
Ratna Sari, S.Pd.I., M.Psi.	Anggota Pengusul	Pencacah data
Lailatul Rosyidah	Mahasiswa Bimbingan	pencairi data
Wahdan Najib Habiby, M.Pd	Pakar Bidang	Mengembangkan Modul dan melakukan survey

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Kepakaran
Universitas Muhammadiyah Surakarta	Wahdan Najib Habiby, M.Pd	Pendidikan Sekolah Dasar

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun	Jenis Luaran
1	Publikasi Jurnal Internasional terindeks SCOPUS,

Luaran Tambahan

Tahun	Jenis Luaran
-------	--------------

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Total Keseluruhan RAB Rp. 20,000,000

Tahun 1 Total Rp. 20,000,000

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
BAHAN	ATK	Kertas HVS dan flashdis	Paket	2	Rp. 360,000	Rp. 720,000
PENGUMPULAN DATA	FGD Persiapan	konsumsi dan snek	Paket	7	Rp. 500,000	Rp. 3,500,000
PENGUMPULAN DATA	Biaya Konsumsi	konsumsi dan snek	OH	7	Rp. 300,000	Rp. 2,100,000
ANALISIS DATA	Biaya Konsumsi Rapat	konsumsi dan snek	OH	7	Rp. 275,000	Rp. 1,925,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Biaya Konsumsi Rapat	konsumsi dan snek	OH	7	Rp. 200,000	Rp. 1,400,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Biaya pembuatan dokumen feasibility study	penyusunan laporan	Paket	1	Rp. 500,000	Rp. 500,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	APC sinta 2	Paket	1	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000
PELAPORAN, LUARAN WAJIB, DAN LUARAN TAMBAHAN	Publikasi Artikel di Jurnal Internasional	APC jurnal Scopus Q3	Paket	1	Rp. 5,555,000	Rp. 5,555,000
PENGUMPULAN DATA	HR Petugas Survey	Observasi lapangan	OH/OR	3	Rp. 300,000	Rp. 900,000
PENGUMPULAN DATA	Transport	rental mobil	OK(Kali)	3	Rp. 400,000	Rp. 1,200,000

Jenis Pembelian	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Harga Satuan	Total
ANALISIS DATA	HR Pengolah Data	input data	Per Penelitian	7	Rp. 50,000	Rp. 350,000
ANALISIS DATA	HR Pengolah Data	analisis data	Per Penelitian	7	Rp. 50,000	Rp. 350,000

5. LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKEMA:

Judul : EVALUASI MODEL MANAJEMEN SEKOLAH DASAR INKLUSI BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
 Peneliti/Pelaksana : Akif Khilmiyah, Dr., M.Ag.
 NIDN : 0512026801
 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 Program Studi/Fakultas : Psikologi Pendidikan Islam
 Nomor HP : 081393700590
 Alamat surel (e-mail) : akif.khilmiyah@umy.ac.id

Anggota

Nama : Ratna Sari, S.Pd.I., M.Psi.
 NIDN : 0501088601
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Nama : Lailatul Rosyidah
 NIM : 20180720019
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Nama : Wahdan Najib Habiby, M.Pd
 NIK : 3321042107820002
 Institusi : UMS

Mitra : Universitas Muhammadiyah Surakarta
 Nama Mitra : Wahdan Najib Habiby, M.Pd
 Kepakaran : Pendidikan Sekolah Dasar

Biaya : Rp. 20,000,000

Yogyakarta, 28 Juli 2021

Mengetahui,
Kepala LP3M,



Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM
NIP. 196210231991031003

6. RINGKASAN

Tujuan umum penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pelaksanaan sekolah inklusi dan berusaha mengembangkan model manajemen sekolah inklusi yang berkeadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahun dalam, Tahun I yakni tahap evaluasi dan Tahun II, tahap solusi, yakni pembuatan model manajemen. Pada tahap evaluasi, dilakukan penelusuran pustaka dan pengumpulan informasi tentang masalah manajemen pendidikan SD inklusi bagi penyandang disabilitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sekolah inklusi, serta mengkaji kesulitan dan harapan yang dialami guru dan siswa pada SD inklusi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Pada Tahun II, tahap solusi, dilakukan perancangan model manajemen pendidikan SD inklusi bagi penyandang disabilitas yang berkeadilan dalam 6 dimensi. Subjek penelitian yakni siswa penyandang disabilitas dan guru SD inklusi di tiga SD inklusi yakni SD Negeri 1 Tlirenggo Sleman, SD Negeri Karanganyar Bantul, dan SD Muhammadiyah Notoprajan Kotamadya Yogyakarta. SDN pajangan dan SD Laweyan Surakarta, SD Harapan dan SD Isriyati Semarang Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang didasarkan pada perbedaan budaya sekolah dan jumlah siswa. Subyek dipilih secara triadic yakni kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data berupa: (1) observasi nonpartisipan, (2) wawancara terpimpin, (3) FGD, dan (4) dokumentasi. Teknik Analisis Data, untuk data kuantitatif dianalisis dengan statistik diskritif, sedang data kualitatif dianalisis secara diskriptif evaluatif model CIPP dari Stafelbeam, dan dianalisis menggunakan tahapan dari Miler dan Huberman melalui tahap, reduksi data, display data, dan kesimpulan sementara. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini: (1) Manajemen sekolah inklusi masih dilakukan secara regular, belum memberikan kekhususan kurikulum dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan ABK. (2) Masih terdapat kesenjangan pelayanan pada anak ABK dengan anak normal, terutama dalam layanan penyediaan guru pendamping dan ketersediaan sarana penunjang. (3) Tingkat efektifitas Sekolah Dasar inklusi masih rendah dalam membentuk siswa ABK untuk mandiri dan bersosialisasi dengan anak normal. Implikasi penelitian ini bahwa sekolah inklusi perlu memperbaiki aspek administrasi maupun sumber daya manusia dalam perbaikan pelayanan siswa disabilitas.

7. KEYWORDS

Evaluasi, Model Manajemen, Pendidikan inklusi

8. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

LATAR BELAKANG

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang melindungi disabilitas seperti keberadaan kebijakan di tingkat nasional yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan diperkuat dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2015 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah yang menolak menjadi sekolah inklusi. Akibatnya masih ada sekitar 1500 penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan formal. Salah satu dari banyak hak asasi penyandang disabilitas yang diatur dalam konvensi hak azasi penyandang disabilitas (UN-CRPD) adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Tujuannya untuk mewujudkan hak tanpa diskriminasi dan atas dasar kesempatan memperoleh pendidikan yang sama sebagai warga negara (Republik Indonesia, 2011). Masih banyak ditemukan berbagai upaya penghindaran kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, dengan berbagai alasan. Namun tidak ada tindakan sanksi yang tegas bagi sekolah yang menolak anak disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, ini dapat dilihat pada data sensus nasional tahun 2013, data yang berhasil dicatat oleh BPS (Biro Pusat Statistik) menunjukkan ada 1.480.000 orang penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 5% dari mereka yang menerima pendidikan formal. Padahal berdasarkan hasil penelitian Taufik, dkk (2014), bahwa tidak ada Perda (peraturan daerah) yang menghambat penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan. Sebagai contoh munculnya Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun mengapa keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pendidikan formal masih kecil.

Faktor penyebab rendahnya keikutsertaan penyandang disabilitas pada sekolah formal sebagaimana hasil penelitian(Khan, 2016) ada beberapa faktor yaitu; Pertama, karena sulitnya orang tua untuk membiayai sekolah, karena sebagian besar keluarga dari penyandang disabilitas dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Kedua, sikap keluarga dan masyarakat yang berpikir bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pendidikan. Ketiga, kesulitan mobilitas penyandang disabilitas yang membuat mereka sulit menjangkau sekolah, arsitektur bangunan sekolah tidak dapat diakses penyandang disabilitas. Keempat, ketidakmampuan guru untuk mendidik para penyandang disabilitas. Kelima, tidak tersedianya fasilitas pendukung belajar. Keenam, ketidakcocokan sistem dan metode pembelajaran dengan karakteristik penyandang disabilitas.

Masalah penyandang disabilitas sejauh ini hanya dilihat sebagai masalah yang menjadi tanggung jawab kementerian sosial. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia hanya dipahami dengan baik oleh Kementerian Sosial semata. Kementerian yang lain seakan tidak memahami siapa yang dimaksud penyandang disabilitas, dan apa permasalahan serta kebutuhan mereka. Seperti banyaknya persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas terkait dengan manajemen sekolah inklusi yang belum berfihak kepada anak berkebutuhan khusus. Meskipun seharusnya manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah (Dian Putera. 2016).

Siswa sekolah inklusi itu terdiri dari siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus, maka bagi siswa berkebutuhan khusus bisa diterapkan manajemen pelayanan khusus. Penyelenggaraan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan di sekolah. Dengan demikian keperluan ABK tidak terabaikan dalam proses pembelajaran. Manajemen pelayanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan agar memudahkan atau memperlancar pembelajaran khususnya bagi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Manajemen pelayanan khusus terdiri atas manajemen pelayanan perpustakaan, bimbingan konseling, kesehatan, asrama, kantin, parkir, mobil antar jemput dan lain-lain. Manajemen pelayanan khusus di sekolah inklusi lebih kompleks dari pada pelayanan di sekolah reguler. Karena itu, masih banyak kendala di sekolah sekolah inklusi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sebagaimana hasil penelitian Wati (2014) dan Tarnoto (2016) tentang manajemen pendidikan inklusi pada sekolah dasar mengalami kendala, diantaranya adalah masalah pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana belum memadai dan kurangnya tenaga sumber daya manusia seperti guru pendamping.

Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) dalam penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dian Putera. 2016). Manajemen pendidikan pada sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan

pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah. Menurut Rejandran & Elavarasi (2016), keberhasilan implementasi pendidikan inklusif memerlukan pendekatan seluruh sekolah, dimana setiap bagian dari sistem harus disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa. Namun, guru memainkan peran utama untuk keberhasilan implementasi pendidikan inklusi.

Hendro Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi merupakan istilah yang diciptakan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Makna utama dari inklusi adalah fleksibilitas, mengakui bahwa anak-anak belajar pada tingkat yang berbeda, dan perlu adanya guru yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pembelajaran mereka dengan cara yang fleksibel. Konsep pendidikan inklusi ini termasuk penggunaan metode yang berbeda untuk merespon kebutuhan yang berbeda pada anak-anak. Manfaat dari pelaksanaan sistem pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas adalah, untuk memutus siklus kemiskinan dan pengucilan, Meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua, membantu mengatasi diskriminasi, dan mempromosikan inklusi secara lebih luas (Leliy Kholida. 2016).

Pelaksanaan manajemen pelayanan khusus pada sekolah inklusi harus bertanggung jawab dalam mengatur: (1) Manajemen kepesertadidikan, yang mencakup aktivitas perencanaan dan pelaksanaan assessment psikologis, akademik, serta fisik siswa. Berdasarkan profil siswa tersebut dapat untuk menyusun kebutuhan pelayanan pembelajaran. (2) Manajemen kurikulum, disusun berdasarkan kebutuhan khusus siswa yang berasal dari profil siswa. (3) Manajemen sarana-prasarana, meliputi media pembelajaran, gedung, bangunan, serta lingkungan belajar di sekolah yang mudah diakses anak berkebutuhan khusus (David.W (2019).

Menurut Marthan (2007) manajemen Pendidikan inklusi merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi (1) Perencanaan sekolah inklusi, menyangkut kegiatan menetapkan tujuan, mengatur SDM, keuangan, metode, peralatan. (2) pengorganisasian sekolah inklusi, menyangkut pembagian tugas untuk mencapai tujuan, (3) Pengelolaan sekolah inklusi, menyangkut kepemimpinan, supervisi, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, (4) Evaluasi sekolah inklusi, untuk menilai ketercapaian tujuan sekolah inklusi secara efektif dan efisien. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan Pendidikan berkualitas

dan bermakna serta mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif (David.W, 2019). Melalui pendidikan inklusi dapat mendidik karakter siswa yang normal yakni tumbuhnya sikap empati, toleransi, serta menghargai perbedaan di dunia.

Dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan inklusi diperkuat dengan adanya Permendiknas no 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi sebagai berikut: “Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 SD (sekolah Dasar), atau 1 SMP pada setiap kecamatan dan 1 SMA untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusi”.

Adanya sekolah inklusi, belum sepenuhnya menyelesaikan kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendapatkan sekolah yang bermutu. Karena dalam realitanya masih banyak dijumpai sekolah inklusi yang belum memiliki fasilitas sekolah yang menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Demikian pula kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi belum sepenuhnya mengadopsi kurikulum yang sesuai kebutuhan anak ABK. Akibatnya anak berkebutuhan khusus diperlakukan sama dengan anak normal dan akibatn lebih lanjutnya hasil belajar anak ABK kurang optimal. Padahal seharusnya dalam system Pendidikan memungkinkan dilakukannya “diferensiasi pembelajaran” baik dari aspek metode maupun materi untuk merealisasikan kekhususan tersebut, sehingga keberadaan GPK (Guru Pendamping Khusus) sangat diperlukan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengatasi berbagai kesenjangan yang menjadi kendala pada pelaksanaan sekolah inklusi. Penelitian ini dilakukan pada tujuh Sekolah Dasar inklusi model Pure Inclusion (inklusi penuh). Melalui Model ini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di kelas-kelas reguler secara bersama-sama dengan anak-anak yang lain (Ina Agustin, 2016). Pemilihan lokasi sekolah berdasarkan variasi tingkatan status sekolah dan budaya Sekolah Dasar di tiga kota yakni Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen sekolah inklusi, dan mengkaji berbagai kesenjangan yang terjadi antara tujuan program inklusi dan pelaksanaan program layanan Pendidikan serta menemukan tingkat efektifitas program sekolah inklusi dalam meningkatkan sikap empati dan toleransi antar siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif evaluatif dengan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di tujuh (7) Sekolah Dasar inklusi di tiga kota yakni Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, Subjek dipilih secara triadic, terdiri dari 7 kepala sekolah, 14 guru pendamping khusus, 7 guru wali kelas, 70 siswa penyandang disabilitas (ABK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi. Teknik analisis data, untuk data kuantitatif dianalisis dengan statistik diskriptif, sedang untuk data kualitatif dianalisis secara diskriptif evaluatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP dari Stufelbeam yang terdiri dari Context, Input, Proses, dan Produk. Model evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi manajemen sekolah inklusi. Sedangkan untuk mengetahui kesenjangannya antara tujuan program dan hasil program sekolah inklusi, maka digunakan model evaluasi Discrepancy dari Malcom Provus (Arikunto, 2009). Model evaluasi Discrepancy menurut Fernandes terdiri dari lima tahapan, yaitu Design, Instalation, Proses, Product, dan Comparation (Fernandes, 1984). Tahapan dianalisis digunakan pendapat Miler dan Huberman meliputi reduksi data, display data, dan kesimpulan sementara, dan untuk uji keabsahan data digunakan triangulasi sumber data.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sekolah sebagai pelaksana program Pendidikan inklusi memiliki berbagai karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah yang beragam. Kondisi ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses Pendidikan yang layak. Untuk mengetahui keberhasilan suatu program pendidikan diperlukan evaluasi program pelaksanaan Pendidikan inklusi. Adapun model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program sekolah inklusi adalah Model CIPP, karena Pendidikan inklusi ini merupakan sebuah sistem, yang terdiri dari 4 komponen yang saling terkait yakni hal yang melatarbelakangi program (Contexts), bentuk perencanaan program (input), pelaksanaan program (proses), serta hasil program (produk).

A. Evaluasi Konteks Sekolah Inklusi

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (2007) bahwa evaluasi konteks merupakan penilaian terhadap sejarah munculnya program dan tujuan diadakannya program sekolah inklusi. Sebagai penggambaran dan spesifikasi mengenai lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, serta karakteristik populasi dan sampel individu yang dilayani.

Tabel: 1. Sejarah dan Tujuan Program SD Inklusi

Nama SD	Latar Belakang Program inklusi	Tujuan	Siswa ABK	Guru & karyaw	Wali kelas
Bina Harapan	Sekolah swasta mayoritas ABK	Memberikan pelayanan terbaik bagi siswa	34	13	8
Isriati Baiturrahman	Sekolah swasta inklusi	Merubah perilaku dan dapat bersosialisasi	6	54	6
Pajang	Tahun 2010 menjadi sekolah inklusi	Agar anak mendapat Pendidikan yang baik, dan mampu bersosialisasi dengan anak normal	16	22	11
Bromantakan 56	Tahun 2002 ditunjuk Pemerintah menjadi sekolah inklusi	Memberi pelayanan Pendidikan terbaik pada anak ABK	20	26	8
Trirenggo	Banyak siswanya yang ABK bisa melayani dirinya sendiri	Agar anak bisa mandiri melayani dirinya sendiri	36	23	8
Karanganyar	SD Inpres siswa berasal dari masyarakat sekitar yang lambat belajar.	memudahkan masyarakat sekitar menyekolahkan anak ABK, memberi pelayanan sama dengan anak normal.	31	19	6
Notoprajan	SD Muhammadiyah, siswanya banyak yang lambat belajar, kemudian disarankan Dinas jadi sekolah inklusi.	agar siswa yang lambat belajar bisa mengimbangi siswa normal dan mendapat fasilitas yang sama.	5	13	6

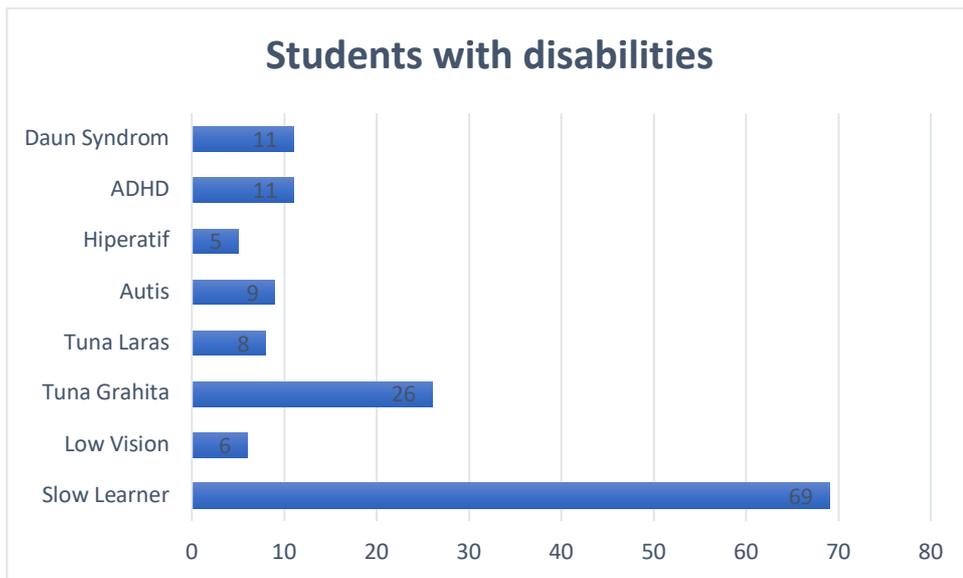
Berdasarkan data di atas, dapat difahami bahwa program pendidikan inklusi pada sekolah dasar dilatarbelakangi oleh adanya permintaan masyarakat di sekitar sekolah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah normal. Hal ini dikarenakan, para orang tua siswa menginginkan anaknya sekolah dengan anak normal, agar bisa bersosialisasi dengan orang normal di masyarakat. Selain itu orang tua ABK merasa malu menyekolahkan anaknya di SLB karena SLB dianggap sebagai sekolah nomer dua dalam penilaian masyarakat. Bahkan ada juga orang tua yang belum bisa menerima jika anaknya itu tergolong ABK, maka mereka memaksakan menyekolahkan anaknya di sekolah anak normal. Sehingga Program sekolah inklusi ini dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun setelah sekolah mendapatkan SK sebagai sekolah inklusi dari pemerintah, tidak diikuti dengan pemberian pelatihan kepada semua unsur sekolah dan penyediaan Guru Pendamping

Khusus yang memiliki kualifikasi dari pemerintah.

Tujuan program sekolah inklusi adalah untuk memberikan pelayanan yang sama kepada anak ABK sehingga mampu bersosialisasi, mandiri, bersikap toleransi terhadap siswa yang memiliki perbedaan kemampuan. Untuk mewujudkan tujuan sekolah inklusi ini diperlukan manajemen sekolah yang fleksibel, dan membutuhkan kesiapan (Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi untuk menjadi Guru Pendamping Khusus (GPK) serta melengkapi sarana yang dibutuhkan ABK untuk kelancaran belajar.

Ada Sembilan klasifikasi anak berkebutuhan khusus (Delphie, 2006) Tuna netra, Tuna rungu wicara, Tuna grahita (perkembangannya lambat), Tuna daksa(kelainan tulang), Tuna laras (sering bikin onar), Autis (kelainan syaraf, sulit bicara), Hiperaktif (kelainan emosi), learning disability(prestasi akademik rendah (hambatan fungsi otak),kelianan perkembangan ganda termasuk neorologis (multitanddicapped). Sedangkan Chalidah (2015) mengelompokkan ABK menjadi 5 golongan: Kelainan mental (lambat belajar), kelianan sensoris (visual and auditori impairments), gangguan komunikasi (learning disability), gangguan perilaku (tuna laras), cacat berat (tuna ganda).

Dilihat dari in put siswa ABK memang sangat beragam pada tujuh sekolah inklusi ditiga kota ini sebagaimana pada diagram berikut ini.



Gambar : 1 Jumlah siswa ABK

Pada data gambar histogram tersebut dapat diketahui bahwa siswa ABK yang paling banyak adalah anak yang mengalami lambat dalam belajar sebanyak 69 siswa, dan siswa tuna grahita sebanyak 26 siswa. Kedua jenis ABK ini tergolong ringan karena model pembelajarannya bisa mengikuti yang klasikal. Namun jenis ABK yang lain seperti Autis, Hiperaktif, Daun Syndrom, ADHD, dan Low Vision ini memerlukan Guru Pendamping Khusus secara individual. Dimana pendanaan GPK selama ini diserahkan pada orang tua siswa. Karena sekolah tidak menyediakan dana yang cukup untuk menanggung guru pendamping khusus anak ABK.

Penerimaan siswa ABK dengan kondisi berat ini mulai ada sejak tahun 2018, sejak adanya aturan penerimaan siswa baru untuk sekolah inklusi, assessment psikologinya dilakukan oleh Dinas, tidak lagi melibatkan unsur sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Is selaku kepala sekolah inklusi sebagai berikut:

“Kalau dulu kita dapat menentukan sendiri, jadi kita sudah menentukan mana yang kita terima dan mana yang tidak. Tapi kalau mulai tahun 2018 murid yang datang ke sekolah inklusi itu melalui dinas. Jadi yang menyeleksi itu dinas. Apapun nanti kendala anak itu kita harus mau menerima entah itu berat, entah itu sedang maupun ringan. Nah susahnyanya disitu kalau kita dapatnya yang berat”

Melalui hasil wawancara kepala sekolah inklusi tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah terlalu dominan dalam menentukan penerimaan siswa ABK di Sekolah Inklusi. Sehingga sekolah inklusi seakan tak berdaya untuk menentukan sendiri siswa ABK yang diterima, agar sesuai dengan ketersediaan GPK dan sarana yang dimiliki. Untuk memberdayakan sekolah seharusnya unsur sekolah juga diajak untuk melakukan assessment psikologis siswa untuk dilakukan seleksi, sehingga perencanaan pembinaan siswa dilakukan sejak dari awal oleh unsur sekolah dan Dinas. Dengan demikian Dinas juga menjadi mengetahui kemampuan masing masing dalam menerima ABK, dan diharapkan pemerintah menambah sarana dan GPK yang standar untuk sekolah inklusi yang menjadi binaannya.

Berdasarkan uraian pada evaluasi konteks program Pendidikan inklusi sudah tergolong kurang bagus. Karena program inklusi ini kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang memiliki anak disabilitas. Tujuannya memberikan pelayanan yang baik agar siswa disabilitas mampu mandiri, toleransi, dan bersosialisasi dengan orang normal. Namun setelah sekolah diberikan Surat Keputusan menjadi sekolah inklusi, tidak diikuti dengan pelatihan bagi warga sekolah. Tidak ada pendampingan program dan penyediaan sarana pendukung serta

tidak diberikan guru pendamping yang memadai. Akibatnya program sekolah inklusi ini berjalan kurang maksimal karena terkendala pada persoalan pendanaan, untuk melengkapi sarana pendukung dan pemberian honor untuk guru pendamping khusus.

B. Evaluasi Masukan Sekolah Inklusi

Evaluasi masukan sebagai penilaian yang membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternative yang diambil, rencana dan strategi agar bisa mencapai tujuan, prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Evaluasi masukan menilai pendekatan alternative, rencana kerja, rencana kepegawaian, serta anggaran untuk kelayakan dan efektifitas biaya untuk memenuhi kebutuhan sasaran dan mencapai tujuan. Informasi yang terkumpul di tahap penilaian hendaknya digunakan untuk menentukan sumber serta strategi dalam keterbatasan dan hambatan yang ada.

Adapun input dari tujuh sekolah inklusi ini adalah sebagai berikut:

Tabel: 2 Strategi mencapai Tujuan Sekolah Inklusi

Nama SD	Strategi mencapai tujuan	Efektifitas dana
Bina Harapan	Membangun simbiosis mutualisme antara pihak sekolah dengan Fakultas psikologi di Universitas.	Pengajar harus lulusan PGSD/PLB dan siswa baru di assessment dari psikolog
Isriati	Ada komunikasi dan kerja sama antar guru dalam proses pembelajaran	Guru Pendamping Khusus (GPK) dicarikan dan digaji oleh wali siswa. fasilitas sama dengan siswa regular.
Pajangan	Ada Kerjasama guru wali kelas, guru mata pelajaran dan guru GPK untuk merancang model pembelajaran bagi siswa ABK.	Orang tua mendukung pembiayaan GPK dan tes psikologi untuk ABK
Bromantakan	Mengikut sertakan stakeholder dalam pelatihan dan seminar tentang sekolah inklusi	Kuota siswa yang diterima 5% disabilitas. Tes psikologi Kerjasama dengan Dinas. Kesejahteraan untuk GPK dari Dinas dan orang tua siswa.
Trirenggo	Pelatihan mengajar untuk GPK dan guru kelas.	Kerjasama dengan 5 Universitas, Dinas, dan puskesmas.
Karanganyar	GPK dan Guru kelas harus mengetahui karakter siswa disabilitas yang diajar dan setiap hari menemani siswa di kelas.	GPK perlu persiapan internal dan eksternal, maka harus ikut pelatihan dari dinas , sekolah, dan universitas.
Notoprajan	GPK mengkomunikasikan kepada orang tua siswa ABK hasil asesment dari Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Pelatihan diberikan utk semua guru dan staf sekolah

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui semua sekolah inklusi sudah melakukan strategi yang dapat mencapai tujuan program inklusi. Keegiatannya hampir sama yakni menyiapkan SDM yang mampu mengajar dan mendampingi siswa disabilitas dengan pelatihan untuk guru wali kelas, guru pendamping, dan karyawan sekolah. Selain itu juga dilakukan peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan untuk melakukan asesmen pada saat penerimaan siswa baru. Hal ini menunjukkan adanya upaya efisiensi dan efektifitas untuk pencapaian tujuan.

Namun yang masih tampak kurang adalah kesiapan dalam memberikan sarana khusus pada siswa disabilitas. Sebab dari ketujuh sekolah inklusi tersebut hanya SD Trirenggo yang menyediakan sarana yang memadahi untuk siswa disabilitas, bahkan membuat Unit Layanan Disabilitas, dan memberikan gaji buat GPK yang berasal dari Dinas Pendidikan. Sementara yang lain ketersediaan GPK tidak sebanding dengan jumlah siswa disabilitas. Orang tua siswa yang mencari dan menggaji GPK yang mendampingi anak mereka.

Pada unit layanan ini juga terdapat dokter spesialis ahli neurologi yang juga ikut membantu dalam memberikan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus. Alat bantu untuk berjalan ini atau sebagai alat terapi untuk berlatih berjalan bagi siswa yang mengidap tuna grahita



Gambar 2. Unit Layanan Disabilitas di SD 1 Trirenggo

Sarana dan prasarana yang dimiliki SD 1 Trirenggo ini merupakan hasil kerjasama dengan dokter yang rumahnya dekat sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu In (selaku GPK) sebagai berikut:

“jadi pelayanan yang kedua di tahun ini kita baru menggarap unit layanan kesehatan.

Terkait dengan ini SD melakukan mou dengan pak dokter Prasajo agar bisa melakukan praktik dan juga melakukan asesment terkait anak yang berkebutuhan khusus. Dan berjalan kurang lebih 2 bulan terakhir. Untuk awal program inklusi saja namun menjadi melebar bisa menjadi unit layanan kesehatan. Dan untuk sekolah layanan kesehatan ini baru ada satu di Yogyakarta dan bahkan di Indonesia”(In/21/10/2019)

Penjelasan yang serupa juga diberikan oleh ibu An (selaku GPK) sebagai berikut:

”Kamar mandi di sini juga sudah terdapat pegangan bagi siswa yang tuna daksa, yang ada di ruang inklasijuga terdapat alat pembelajaran seperti pelatihan jalan, pelatihan motorik, dan model-model gambar dan kursi roda sebagai sarana penunjang. Untuk media penunjang pendidikan inklusi, kami memiliki ruang inklusi seperti bola berpikir untuk melatih motorik ada juga puzzle-puzzle dan model gambar untuk menunjang siswa ABK” (An/30/10/2019).

Penyediaan sarana penunjang mengikuti kebutuhan anak itu sendiri. Seperti tuna daksa yang memiliki kekurangan di fisiknya maka harus difasilitasi dengan menggunakan alat bantu seperti kursi roda dan juga alat bantu jalan yakni pegangan untuk membantunya ketika ingin berjalan ataupun berpindah tempat. Dan untuk slow lerner menggunakan alat bantu pembelajaran berupa kartu yang terdapat gambar atau berupa papan yang ada huruf lalu di tempel tempelkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka evaluasi input sekolah inklusi menunjukkan kategori cukup baik, karena semua sekolah telah menyiapkan SDM dengan memberikan pelatihan terhadap guru dan staf karyawan, serta menjalin kerjasama dengan universitas dan Dinas pendidikan untuk melakukan seleksi siswa baru. Namun kesiapan sarana penunjang, pendanaan, dan penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) masih sangat kurang. Sehingga sekolah inklusi tidak memberikan kenyamanan pada siswa disabilitas karena kurikulum yang dipersiapkan juga bukan kurikulum khusus yang diperuntukkan untuk Anak berkebutuhan khusus.

C. Evaluasi Proses Sekolah Inklusi

Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur pada tahap implementasi, menyediakan informasi bagi keputusan program dan sebagai rekaman arsip yang telah terjadi. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui sejauhmana rencana diterapkan, dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Karena itu, evaluasi proses digunakan untuk menilai kegiatan dan memberikan umpan balik kinerja guru dan karyawan.

Tabel 3. Kurikulum, Metode, Standar Penilaian

Nama SD	Kurikulum	Metode - Media	Standar Penilaian
Bina Harapan	kurikulum reguler	guru memberi perlakuan yang berbeda, setiap kls hanya 4-7 siswa.	menurunkan standar penilaian agar siswa ABK tertolong, belum ada acuan penilaian dari Pemerintah
Isriati	kurikulum reguler	Model pembelajaran untuk anak ABK dirancang bersama oleh Guru wali kelas, guru mata pelajaran dan GPK.	Penilaian dibedakan membuat dua jenis soal.
Pajangan	kurikulum reguler	Menjalin kerjasama dengan SLB Negeri dalam menangani anak ABK yang membutuhkan pelayanan khusus dan dalam melakukan psikotes, serta untuk mencari GPK.	Penilaian dibedakan standarnya
Bromantakan	Kurikulum reguler	Memberikan pelatihan cara mengajar dan mendampingi anak ABK yang dicampur anak normal.	Penilaian di sesuaikan
Trirenggo	kurikulum reguler	selalu memperbaharui metode mendidik siswa berkebutuhan khusus menggunakan metode pull out atau pendampingan secara mandiri	Perbedaan nilai minimal KKM
Karanganyar	kurikulum reguler	Menyesuaikan dengan anak ABK, kadang ceramah, gambar, bermain. Pemberian pendampingan yang khusus jika kurang kondusif ditaruh di kelas "abu-abu" hingga anak tersebut cukup bisa kondusif untuk berbaur lagi di kelas inklusi.	Penilaiannya dengan standar minimal seorang anak berkebutuhan khusus
Notoprajan	kurikulum reguler	Bagi slow lerner di berikan materi tambahan dan juga bagi anak yang berkebutuhan belajar di berikan bimbingan yang khusus	sistem penilaian yang di lakukan cara perbedaan indikator pencapaiannya buat berbeda.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui terdapat kesamaan dalam pelaksanaan program sekolah inklusi di tiga kota ini yakni bahwa kurikulum yang dipakai adalah kurikulum reguler semua, karena memang pemerintah belum menyediakan kurikulum khusus untuk sekolah inklusi. Akibatnya dalam pelaksanaan kurikulum SD inklusi guru kelas membuat variasi metode mengajarnya disesuaikan dengan jenis disabilitas apa yang dimiliki siswa ABK. Demikian juga dalam sistem penilaiannya dibedakan standart capaian minimal untuk siswa ABK dan siswa normal.

Belum adanya petunjuk teknis tentang implementasi sekolah inklusi dari pemerintah, membuat masing masing sekolah inklusi membuat sendiri-sendiri rekayasa kurikulumnya. Karena berbeda dengan sekolah SLB, maka sekolah inklusi kurikulumnya dibawah reguler namun di atas sekolah luar biasa. Para pimpinan

sekolah hanya mengira ira saja, tidak ada patokan yang dijadikan acuan. Akibatnya kurikulum lebih banyak ditentukan oleh kualitas SDM kepala sekolah dan guru serta ketersediaan sarana yang dimiliki oleh setiap sekolah. Maka tidak mengherankan apabila peningkatan kemampuan anak ABK antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu berbeda. Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya pembinaan rutin yang diberikan Dinas kepada sekolah inklusi, terutama untuk guru GPK yang dicarikan oleh orang tua siswa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh GPK di SD Negeri Pajangan I Surakarta sebagai berikut.

“Kalau dari dinas seharusnya di sini ada PLA yang terjun menengok atau pendampingan berapa bulan sekali ke sini lihat anaknya gimana, tapi sejak di Dinas dibuka untuk umum jadi banyak orang yang langsung ke Dinas. Jadi ketika kami sebagai sekolah inklusi ada masalah kita yang harus kesana. Harusnya kalau kerjasama kita dibawahnya PLA atau dinas harusnya ada guru kunjung, misal ada hambatan apa atau apalah. Tiba-tiba ada aturan kalau akan tes psikologi harus ke Dinas. Padahal psikolog di Dinas juga tidak tahu perkembangan anak ABK selama di sekolah. Sedangkan hasil yang keluar berbeda dengan apa yang kita hadapi disekolah setiap hari sebagai pendamping. Sebenarnya kita inginnya mereka menengok kesini tapi sampai sekarang belum ada tindakan itu untuk sekolah inklusi. Ya mungkin ada tapi belum maksimal”.(Ira/6/1/2020).

Penjelasan guru GPK tersebut, menunjukkan bahwa hubungan kerjasama antar sekolah inklusi dengan Dinas kurang terjalin dengan baik, sehingga masih muncul perbedaan pemahaman tentang tugas PLA (Pembimbing Lapangan) dan pembagian wewenang sekolah dengan Dinas. Seharusnya keduanya Bersama sama membenahi pelayanan pembelajarannya untuk anak ABK dalam sekolah inklusi. Bahkan masih ditemukan sekolah inklusi yang tidak diberi guru GPK dari Dinas, sehingga orang tua siswalah yang mencarikan dan menggaji guru GPK (shadow teacher) yang belum terstandar pendidik.

Adapun pembagian tugas yang biasa dilakukan pada sekolah inklusi adalah pembagian tugas berdasarkan jabatan, sebagaimana yang dikemukakan Bapak MD selaku Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Kepala sekolah dengan yayasan bertugas menyusun program yang akan dilaksanakan, Guru kelas dan guru GPK bertugas menyediakan media pembelajaran, materi bahan ajar, Menyusun RPP (Rencana Persiapan Pembelajaran). Bekerja sama dengan orang tua siswa ABK untuk penyediaan GPK. Guru pembimbing khusus/shadow teacher juga mendapatkan bimbingan dari guru BK di sekolah, sebulan sekali diadakan forum bersama untuk sharing antar guru pendamping khusus” (MD/15/11/2019).

Berdasarkan hasil observasi kelas, dapat dilihat bahwa guru kelas sangat tidak terampil dalam mengendalikan kelas inklusi, jika tidak ada GPK didalamnya. Sebagaimana yang dikemukakan Bp Ali salah satu guru GPK sebagai berikut.

“ Belum semua guru mendapatkan diklat-diklat yang dibutuhkan untuk mengajar di sekolah inklusi, saya sendiri juga belum begitu faham. Maka saya hanya memberikan materi saja, tetapi jika anak ABK membutuhkan ujian atau tes saya menilainya dengan standart yang berbeda dengan anak normal. Maksudnya kategori tujuh untuk anak normal dengan tujuh anak ABK sudah berbeda, karena harus ada pendampingan. Kalau tanpa guru pendamping khusus (GPK) akan sulit dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, sebab anak ABK di sekolah inklusi memiliki keterbatasan yang berbeda-beda tingkatannya”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan sekolah inklusi dengan keberadaan GPK (guru Pendamping Khusus), karena merekalah yang sudah mahir dan berpengalaman dalam mendampingi dan mengajar anak ABK. Namun sayangnya sekolah dan pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk memberikan kesejahteraan pada guru GPK. Ini artinya diklat dari Dinas maupun dari sekolah untuk semua guru sekolah inklusi perlu ditingkatkan frekwensinya. Agar kompetensi guru sekolah inklusi meningkat dan bisa melayani anak ABK dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka evaluasi proses program sekolah inklusi masih tergolong cukup baik, karena sudah mengajar dengan bervariasi metode dan media pembelajarannya. Sistem penilaiannya juga sudah dibedakan antara standar penilaian untuk anak ABK dan anak normal. Komponen yang perlu diperbaiki adalah pada persoalan kurikulum yang masih sama dengan sekolah biasa, seharusnya kurikulum sekolah inklusi itu berbeda, karena yang diajar juga berbeda tingkat kemampuannya. Pemberian pelatihan pada semua guru masih kurang. Guru GPK disuruh maksimal mendampingi siswa namun tidak diberikan kesejahteraan yang memadai dari sekolah maupun Dinas. Standar pemberian nilai untuk anak ABK harus dibuat secara jelas kriteria standar penilaiannya.

D. Evaluasi Hasil Sekolah Inklusi

Evaluasi hasil digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang

sudah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dan menginterpretasikan hasil capaian program. Hasil evaluasi dipakai untuk membuat keputusan berkaitan dengan kelanjutan maupun tidak lanjut program. Apakah program sekolah inklusi tetap dilanjutkan dengan berbagai revisi atau dihentikan jika program dinilai tidak bermanfaat.

Tabel: 4 Keberhasilan Program

Nama SD	Keberhasilan Program	Prosentase
Bina Harapan	Siswa dapat lulus UN dengan nilai KKM khusus dan mampu mandiri.	90% lulus
Isriati	Siswa ABK mampu lulus UN dengan KKM khusus dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan	100% lulus
Pajangan	Siswa dapat lulus UN dan bisa mandiri	80% lulus UN
Bromantakan	Siswa ABK mampu mengikuti UN dan lulus dengan nilai minimal yang ditentukan oleh sekolah.	90% lulus UN
Trirenggo	Siswa ABK mendapatkan prestasi non akademik, dan dapat Mengembangkan potensi yang dimiliki.	95% memenangkan lomba
Karanganyar	Anak dapat belajar dan saling toleransi	80% dapat toleran
Notoprajan	Siswa ABK lulus UN dan mandiri	100% lulus UN

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa keberhasilan program sekolah inklusi dapat dilihat dari besarnya prosentase kelulusan ABK mengikuti UN yakni rata-rata 90% siswa ABK lulus UN. Meskipun dengan standar penilaian yang berbeda dengan siswa normal, namun setidaknya anak ABK berhasil lulus UN dan lebih mandiri serta bersikap toleran dengan perbedaan perilaku dan kondisi teman di sekolah.

Peneliti menemukan banyaknya kebingungan yang dirasakan oleh para pelaku program inklusi di sekolah sehingga menimbulkan efek domino pada hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ke tujuh sekolah inklusi juga menganggap bahwa, siswa ABK lulus UN dengan standar yang ditentukan sekolah merupakan salah satu keberhasilan program inklusi yang berjalan selama anak tersebut menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Akan tetapi yang perlu diketahui juga bahwa bagi siswa ABK sebetulnya bukan saja pencapaian dalam bidang akademik yang seharusnya menjadi standar atau tolak ukur yang ditentukan oleh masing-masing sekolah. Salah satunya prestasi di bidang non akademik juga patut diberikan apresiasi juga menjadi standar keberhasilan bagi sekolah dan siswa ABK, selain itu juga dengan sikapnya yang mudah bernegosiasi, bersosialisasi

dengan guru dan teman yang ada di lingkungan sekolah juga menjadi hal-hal yang patut diperhatikan untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan siswa ABK tersebut selama masa bersekolah di sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka evaluasi hasil program Pendidikan inklusi dapat dikategorikan dalam penilaian cukup baik. Karena tujuan yang telah dicanangkan sekolah Bersama orang tua siswa, yakni agar anak inklusi bisa lulus UN, bisa mandiri, bisa bersosialisasi, dan bisa mengukir prestasi non akademik sudah berhasil dicapai dengan prosentase yang tinggi. Namun masih terbatas pada dua sekolah inklusi yang menomersatukan penggalian potensi kelebihan siswa ABK yang berupa prestasi non akademik dan penguasaan soft skills seperti kemampuan bersosialisasi, toleransi dan bisa mandiri. Sementara yang lain masih menilai keberhasilan siswa melalui prestasi akademik yakni kemampuan lulus UN. Ini menunjukkan bahwa, kebanyakan sekolah inklusi masih memosisikan anak ABK sama dengan anak normal yang harus menguasai prestasi akademik.

E. Kesenjangan antara tujuan program, pelaksanaan program, dan hasil program sekolah inklusi

Untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan program sekolah inklusi dapat dikaji dari pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi dan fungsi manajemen yang meliputi:

1. Perencanaan sekolah inklusi, diawali dengan kegiatan menetapkan tujuan. Adapun tujuan sekolah inklusi adalah agar semua anak mendapat kesempatan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi. Namun dalam kenyataannya tidak semua siswa difabel bisa diterima di sekolah inklusi. Sebab calon siswa baru harus diseleksi tingkat difabilitasnya oleh Dinas Pendidikan dan sekolah, guna memperoleh peserta didik dengan tingkat difabilitas yang masih bisa ditangani oleh sekolah inklusi, karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemilahan siswa berdasarkan tingkat difabilitasnya ini bukan menunjukkan diskriminasi, tetapi justru menunjukkan keinginan memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi disabilitas.

Kegiatan perencanaan manajemen SDM yang meliputi manajemen Pendidik dan kepesertadidikan, menunjukkan kondisi yang berbeda. Manajemen guru tampak kurang direncanakan dengan baik, karena ditemukan banyak guru yang kurang

kompeten dalam menangani ABK, guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dihadapkan pada banyaknya guru yang belum faham tentang ABK dan sekolah inklusi. Kurangnya jumlah guru GPK, dan tidak sesuai latar belakangnya Pendidikan guru GPK. Beban guru meningkat dan tidak maksimal dalam menangani siswa, Proses Kegiatan Belajar Mengajar tidak berjalan lancar. Pelaksanaan sekolah inklusif tidak maksimal.

Sedangkan manajemen perencanaan kepesertadidikan sangat teratur dengan melakukan seleksi siswa baru dengan assessment psikologis, akademik, serta fisik siswa. Maka profil siswa di sekolah dasar inklusi sebagian besar merupakan anak disabilitas yang mengalami slow learner dan tuna grahita yakni anak yang mengalami kelambatan memahami pelajaran dan kesulitan dalam pendengaran, dan hanya sedikit yang mengalami hiperaktif dan autisme.

2. Pengorganisasian sekolah inklusi, menyangkut pembagian tugas untuk mencapai tujuan. Setelah tujuan sekolah inklusi ditetapkan, maka Langkah berikutnya adalah Menyusun kurikulum berdasarkan profil siswa. Namun hal ini tidak dilakukan baik oleh pemerintah (dinas Pendidikan) sebagai pemberi Surat Keputusan menjadikan sekolah inklusi. Sehingga masing masing sekolah tetap menggunakan kurikulum regular untuk mengajar anak inklusi. Ini jelas sesuatu yang tidak adil, kemampuan anak disabilitas berbeda dengan anak regular, namun harus mengikuti kurikulum regular.
3. Pengelolaan sekolah inklusi, meliputi pelaksanaan dan pengelolaan sekolah inklusi. Pelaksanaan dan pengelolaan sekolah inklusi tergantung pada kreativitas pimpinan sekolah dan guru serta sarana yang dimiliki oleh masing -masing sekolah, sehingga kondisinya tidak sama. Hal itu dikarenakan Pemerintah tidak menyediakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara detail, tentang pengelolaan sekolah inklusi. Manajemen sarana-prasarana, meliputi media pembelajaran, gedung, bangunan, serta lingkungan belajar di sekolah yang mudah diakses anak berkebutuhan khusus dibuat sendiri oleh pimpinan sekolah dan guru. Demikian juga standar pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaian, dan sarana pendukung lainnya ditentukan dan dikelola sendiri oleh sekolah yang terkesan kurang maksimal karena tidak supervise sekolah yang secara rutin mengarahkan pengelolaan sekolah inklusi.

Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat juga banyak terkendala karena Pemerintah kurang mensosialisasikan kebijakan tentang sekolah inklusi. Kebijakan sekolah inklusi tidak disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Kurangnya pelatihan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru.

Kurangnya dukungan dari pemerintah dan semua pihak untuk memenuhi sarana sekolah inklusi. Kondisi tersebut diperparah juga dengan minimnya pemahaman orang tua terhadap sekolah inklusi. Masih banyaknya orang tua yang tidak peduli pada perkembangan anaknya, mereka hanya pasrah sepenuhnya pada sekolah. Orang tua wali siswa reguler juga kurang toleransinya kepada kebutuhan ABK. Masyarakat juga masih memandang rendah anak ABK dan sekolah inklusi. Masyarakat kurang memberi dukungan pada pelaksanaan sekolah inklusi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang sekolah inklusi dan ABK.

4. Evaluasi sekolah inklusi ini meliputi penilaian terhadap ketercapaian tujuan sekolah inklusi secara efektif dan efisien. Dilihat dari tujuan sekolah inklusi yakni agar semua anak mendapat kesempatan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, maka tujuan ini tercapai 100%. Sebab dengan adanya sekolah inklusi maka anak-anak disabilitas dapat kesempatan yang sama untuk masuk sekolah bersama dengan siswa reguler. Dilihat dari kemampuan akademik maka keberhasilan siswa disabilitas lulus UN sebesar 80% menunjukkan bukti adanya usaha sekolah inklusi menolong mengentaskan pendidikan anak disabilitas.

Semua sekolah inklusi membuat standar capaian penilaian akademik yang berbeda untuk anak reguler dan anak disabilitas, sehingga kelulusan anak disabilitas dalam UN menggunakan pertimbangan aspek kemanusiaan semata. Namun yang masih kurang adalah perhatian sekolah inklusi terhadap capaian prestasi non akademis siswa disabilitas seperti kemampuan siswa bersosialisasi dengan temannya dan tingkat kemandirian yang bisa dilakukan serta kemampuan potensi bakat yang bisa dikembangkan. Belum bisa terdeteksi secara baik dan belum bisa dibantu dalam mewujudkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi selama ini belum siap dari segi administrasi maupun sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif. Adapun kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan sekolah inklusi adalah belum ada kurikulum khusus untuk anak disabilitas, belum ada pemberian anggaran dari dinas untuk memenuhi sarana, penyediaan dan penggajian guru pendamping, kurangnya pemberian pelatihan untuk guru maupun pengelola sekolah inklusi. Penelitian ini penting bagi pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan Pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Manajemen sekolah inklusi masih dilakukan secara regular, belum memberikan kekhususan kurikulum dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan ABK. (2) Masih terdapat kesenjangan pelayanan pada anak ABK dengan anak normal, terutama dalam layanan penyediaan guru pendamping dan ketersediaan sarana penunjang. (3) Tingkat efektifitas Sekolah Dasar inklusi masih rendah dalam membentuk siswa ABK untuk mandiri dan bersosialisasi dengan anak normal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusi selama ini belum siap dari segi administrasi maupun sumber daya manusia dalam pelaksanaan sekolah inklusi.

9. STATUS LUARAN

Artikel internasional akan disubmit di IJEC Q1

Artikel sinta akan disubmit di afkaruna S2

10. PERAN MITRA

Mencarikan data dan mengolahnya

11. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak bisa melakukan observasi di sekolah karena daring, data hanya dari wawancara

12. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Menyiapkan artikel jurnal scopus

13. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Andreasen, A. 1995. *Marketing social change: Changing behavior to promote health, social development, and the environment*. San Francisco, CA: Jossey -Bass.

Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Dian Putera. 2016. Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol. 4. No. 1

European Agency for Development in Special Need Education (2008)., Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education. *Recomendations Matrix*. Brussels Belgium.

- Enabling Education Network. 2005. *Learning from Difference*. School of Education. The University of Manchester UK.
- Fatmawati., Indah., 2010. Changing Public Attitude Through Message Framing., *Proceeding ICMSDM Tamkang University*. Taiwan.
- Fernandes. 1984. Evaluation of Educational Program. Jakarta: Rineka Cipta
- Hendro Sugiyono .2015. Metode Evaluasi pembelajaran Inklusif Bagi Peserta Didik Difabel Netra. *Jurnal Inklusi*. Vol. 2. No. 1
- Ina Agustin. 2016. “Manajemen Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang”. *Education and Human Development Journal*. Vol. 1. No. 1
- Kotler, P., & Roberto, W. 1989. *Social Marketing: Strategies For Changing Public Behavior*. New York, NY: The Free Press.
- Leliy Kholida. 2016. Manajemen Pendidikan Inklusi: Social Disability Model. *Jurnal Tarbawi*. Vol. 2. No. 1
- Marno, Trio. 2008. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Rafika Aditama
- Mila Faila. 2018. Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di PAUD Inklusi Saymara Kartasura. *Jurnal At-Tarbawi*. Vol. 3. No. 2
- Nana Syaodih.S. 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya.
- Rajendan, P & Elavarasi D. 2016. Awarnerness of Regular Primary School Teachers Toward Inclusive Education with Special Reference to Special Needs Children. *INSIGHT Journal of Applied Research in Education* Vol.21, No. 1, 2016 ISSN 0975-0665. Srinagar: School of Education and Behavioural Sciences University of Khasmir.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Save the Children. 2002. *School for All*. Including Disabled Children In Education. United Kingdom.

Taufik., Tata., Arni Surwanti., Suryatiningsih BL., Ari Kurniawan., Ibnu Sukaca., Purwanta., Rustam., 2014. *Monitoring Realisasi Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas di Lima Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Working Paper.

Tarnoto, N. 2016. Permasalahan-Permasalahan Sekolah yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Inklusi. *Humanitas, Indonesia Psychological Journal vol 3, No.1 halaman 50-61*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan

United Nation General Assembly in Resolution 61/106. 2007. *The Convention on the Human Rights of Persons With Disabilities and The Optional Protocol to the Convention*

Wasita, Ahmad. 2012. *Seluk-beluk Tunarungu dan Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Jayalitera

Wati, E. 2014. Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran, 14(2)*.

14. LAMPIRAN-LAMPIRAN

.....